

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut (Alabi Y et al., 2015) Akan tetapi penting untuk menyadari bahwa ada kebutuhan standar definisi kecil dan menengah industri dalam sebuah ekonomi. Hal ini perlu penting dalam rangka memberikan kerangka acuan untuk berbagai instansi bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan dalam hal industri UKM. Indonesia mempunyai standar akuntansi yang berlaku umum yang biasanya disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). IAI merupakan organisasi profesi yang mewadahi untuk para akuntan yang ada di Indonesia dan memiliki peran sebagai penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Pelaku UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan menggunakan PSAK umum yang berlaku dengan adanya SAK EMKM. Menurut Pardita et al., (2019:2) SAK EMKM lebih mudah dipahami oleh pengusaha dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha perusahaan sehingga pengusaha –

pengusaha tersebut dapat lebih mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari perusahaan mereka serta dapat mengukur kinerja mereka dalam menjalankan usahanya.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK EMKM disahkan oleh anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 24 Oktober 2016 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 di Jakarta. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018:3) tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk pengguna eksternal. Salah satu contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlihat secara langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkatan kredit.
2. Tidak memiliki akuntabilitas public yang signifikan.

Entitas dikatakan memiliki akuntabilitras public yang signifikan jika:

1. Entitas yang menguasai asset didalam kapasitas sebagai fudisia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti reksa dana, dana pension, bank investasi, entitas asuransi, pialang dan bank; atau
2. Entitas yang telah mengajukan pernyataan untuk pendaftaran, atau dalam sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan SAK EMKM, yang artinya SAK EMKM hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang mempunyai laporan keuangan tidak akuntabel untuk publik secara luas, dimana SAK EMKM untuk diterapkan ke usaha kecil dan menengah.

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut Azizah Rachmanti et al., (2019:4) Laporan Keuangan adalah : “Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti : pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen”.

Menurut Firdaus & Wondabio, (2018:1) Karena tujuan dari adanya laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dapat menguntungkan sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Kalangi et al., (2014:3) Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Kasmir, (2014:34) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah

informasi yang berasal dari sebuah proses akuntansi yang isinya menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu.

2.1.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018:7) dalam PSAK No.1 “Laporan Keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan Laporan Keuangan entitas lain.” Menurut Kasmir didalam bukunya berjudul Analisa Laporan Keuangan terdapat 8 tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- b) Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- c) Memberikan informasi tentang aktiva yang dimiliki perusahaan untuk saat ini.
- d) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- e) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal usaha yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- f) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen di perusahaan didalam suatu periode.
- g) Memberikan informasi tentang keuangan yang lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui kinerja atau gambaran suatu perusahaan dimana informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut

dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti kreditor, investor, pemerintah maupun manajemen perusahaan.

2.1.2.2 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Marisi, (2010:33) menjelaskan pada dasarnya, pemakai laporan keuangan terbagi atas dua kelompok, yaitu pemakai eksternal dan internal. Yang termasuk kelompok pemakai laporan keuangan internal adalah manajemen. Melihat besar kecilnya laba perusahaan agar dapat dilakukan dilakukan evaluasi kinerja keuangannya merupakan tugas dari manajemen. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan juga dibutuhkan sebagai untuk menentukan strategi, pengawasan dan dijadikan ukutan dalam memberikan insentif kepada karyawan. Yang bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan tersebut adalah manajemen.

Kelompok pemakai laporan keuangan eksternal diuraikan oleh Marisi, (2010:34–35) sebagai berikut:

1. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman yang terutama adalah bank, akan tertarik dengan adanya informasi keuangan yang memungkinkan untuk mereka mengetahui apakah pinjaman dan bunga dapat dibayar oleh perusahaan tersebut pada saat pinjaman telah jatuh tempo.

2. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investor berkepentingan dengan adanya resiko yang ada pada investasi mereka dan informasi yang terkait dengan besarnya laba perusahaan sangat menentukan besarnya dividen yang akan didapat oleh perusahaan tersebut. Dari informasi keuangan yang diperoleh, mereka akan mengambil keputusan apakah akan tetap berinvestasi atau menarik investasi yang telah mereka lakukan.

3. Pemerintah dan badan regulator lainnya

Pemerintah dan badan regulasi lainnya berkepentingan untuk aktivitas perusahaan. Pemerintah dan regulator lainnya sangat membutuhkan informasi agar dapat mengatur aktivitas perusahaan tersebut dalam menetapkan kebijakan pajaknya dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Lembaga negara selain pemerintah yang sangat berkepentingan atas laporan keuangan tersebut adalah Bank Indonesia. Dalam melakukan analisis *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara nasional, BI mengumpulkan informasi dari laporan keuangan bank yang dilaporakam secara berkala.

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya akan tertarik dengan informasi jika memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang bisa dibayarkan jika pinjaman tersebut jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan kepada perusahaan dengan tenggang waktu yang pendek daripada pemberi pinjaman. Jika perusahaan tersebut adalah pelanggan utama mereka, maka

mereka akan berkepentingan mengetahui kelangsungan hidup perusahaan tersebut kedepannya.

5. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi beberapa masyarakat dengan berbagai cara. Sebagai contoh, perusahaan bisa memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangannya yang terakhir kemakmuran perusahaan beserta dengan rangkaian aktivitasnya.

6. Karyawan

Karyawan mempunyai kepentingan untuk melihat beberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, kesempatan kerja dan manfaat pension.

7. Pelanggan

Pelanggan memiliki kepentingan tentang informasi mengenai kelangsungan hidup kedepannya perusahaan tersebut, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan tersebut atau dengan kata lain sangat bergantung dengan keberadaan perusahaan tersebut.

2.1.2.3 Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018:8) didalam SAK EMKM yaitu:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

2.1.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Munawir, (2010:34) menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain:

1. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai factor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena factor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dalam satuan uang.
2. Laporan keuangan yang dibuat secara periodic pada dasarnya merupakan *interim report* (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final.

3. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya pada dasarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah.
4. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu.

2.1.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dibawah ini merupakan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Indonesia, (2008) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008:

1. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
2. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
3. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, UKM merupakan usaha rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi agar dapat mencegah persaingan suatu usaha yang tidak sehat. UKM merupakan sebuah usaha rakyat yang dilihat dari banyaknya tenaga kerjanya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja sekitar 20 – 99 orang, dan untuk usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 – 9 orang.

2.1.3.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Kementrian Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Menengah
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 – Rp. 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 – Rp. 50.000.0000.000,00
2. Kriteria Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 – Rp. 2.500.000.000,00
3. Kriteria Usaha Mikro

- a. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 – lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00

2.1.3.2 Kendala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Terdapat dua kendala yang sering muncul dalam UMK menurut David, (2018:16) yaitu :

- 1. Kendala Internal
 - a. Modal
 - b. Hukum
 - c. Akuntabilitas
 - d. Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2. Kendala Eksternal
 - a. Iklim Usaha
 - b. Infrastruktur
 - c. Akses

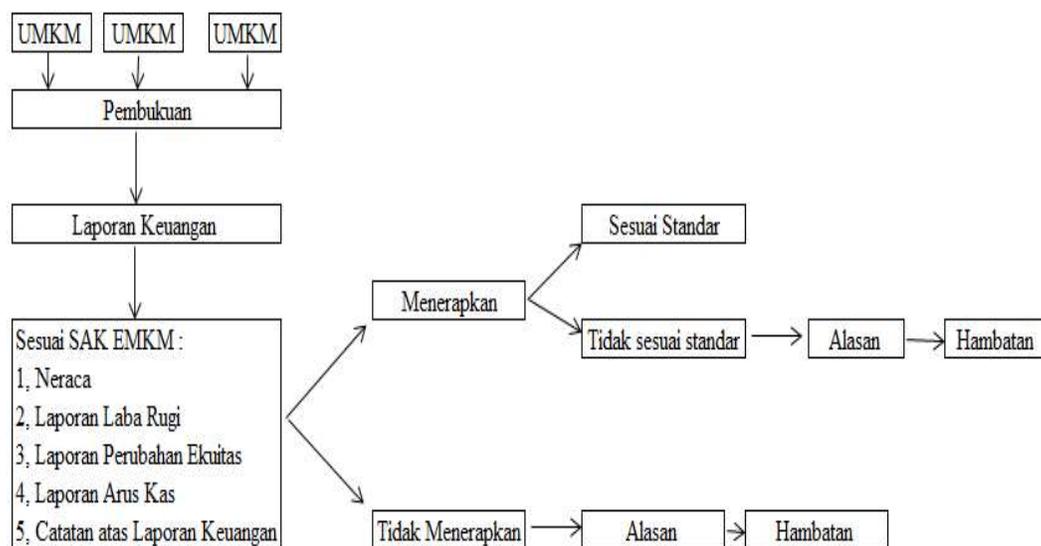
Beberapa kendala UMKM menurut Akifa, (2014:16) yaitu:

- a. Sulit mendapatkan untuk modal jangka panjang
- b. Pemilik tidak mampu mengelola usahanya dan sumber daya manusia (SDM)
- c. Sistem produksi dan pemasaran yang relatif lama.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi kekurangan atau kendala dari UMKM adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yaitu masalah pengetahuan atau pendidikan yang kurang mengenai akuntansi atau tata buku dan juga modal yang terbatas karena pelaku UMKM sulit mengajukan pinjaman ke Bank.

2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, maka secara sistematis dapat dibuat kerangka berpikirnya sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Penjelasan tentang model kerangka berpikir diatas adalahh pertama dipilih UMKM apa yang ingin dijadikan untuk objek penelitian. Setelah itu ditentukan akan melakukan penelitian tentang UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dan selanjutnya penulis mencari tahu tentang pengetahuan dan pengalaman akuntansi yang diketahui

oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota Kota Madya Batam. Dan selanjutnya peneliti mencari tahu pelaku UMKM tersebut sudah menerapkan akuntansi dan pembukuan atau belum.. Apabila UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sudah membuat laporan keuangan, maka akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau belum. Jika belum menerapkan sesuai dengan SAK EMKM dianalisis apakah penyebab sehingga tidak melakukan pembukuan sesuai dengan standar. Setelah dievaluasi mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), selanjutnya dianalisis kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Hasil penelitian |
|----|---|--|--|
| 1 | Hetika,Nurul Mahmudah (2017) E-ISSN: 2548-9836 | Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal | Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana dan para pelaku UMKM di Kota Tegal belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai SAK ETAP |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 2 | Alifia LutfiaAzahra (2015) ISBN: 978-602-8580-19-9 | Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta | Berdasarkan penelitian dari sembilan belas UMKM pengrajin batik diketahui bahwa enam UMKM pengrajin batik menerapkan SAK ETAP dan tiga belas UMKM pengrajin batik tidak menerapkan SAK ETAP. Diketahui bahwa ada dua UMKM pengrajin batik yang tidak melakukan pencatatan, sebelas UMKM pengrajin batik hanya membuat pencatatan keuangan sederhana tanpa membuat laporan keuangan, dan enam UMKM pengrajin batik membuat laporan keuangan. |
| 3 | Cahyanti Hana Pratiwi (2018) E-ISSN: 1411-579 | Penerapan Akuntansi Persediaan Berbasis SAK EMKM Pada UD Andika Jaya Jember | Hasil penelitian bahwa UD Andika Jaya Jember belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya dikarenakan sebagian besar karyawannya adalah ibu rumah tangga sehingga kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai SAK EMKM. |
| 4 | Weli Oktaria, Eri Triharyati (2017) ISSN: 2502-2024 | Judul Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Bengkel Evry Service AC Mobil Kota Lubuklinggau | Dari pelaporan keuangan bengkel service AC Mobil terdapat banyak kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan, hanya terdapat pendapatan, pengeluaran, lain - lainnya |
| 5 | Deddy Kurniawansyah (2016) ISBN 978-602-60569-2-4 | Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi | UMKM belum membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukSan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | <p>Nurlela & Heny Elvia (2016) Volume 05, Nomor 02, 2016, ISSN: 1418-987</p> | <p>Penerapan Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Berbasis SAK ETAP Pada Toko Jamu Nikisami</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kebutuhan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Responden mengakui pentingnya pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi belum menerapkan sesuai SAK ETAP karena berbagai kendala. UMKM di Desa Gembongsari belum menerapkan pencatatan akuntansi sesuai standar baku dan belum menggunakan informasi akuntansi secara optimal.</p> |
| 7 | <p>Rahmad Firdaus and Ludovicus Sensi Wondabio (2018) ISSN: 2352-5428</p> | <p>Financial Report for Micro, Small, and Medium Enterprise According to Financial Accounting Standards: Case Study Rafita Cake</p> | <p>Results from the research in practice, the realization of KUR is still far from target, the reason is the bank did not get enough information related to the condition of SME's, so the bank became very careful in distributing credit. One of the information required by the banks is the financial statements, but many SME's perpetrators have not prepared financial statements in accordance with standards. In addition to the lack of accounting knowledge, existing standards are also considered quite complex.</p> |
| 8 | <p>Ghozi Triananda (2018) ISSN: 2614-6681</p> | <p>Implementasi SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan UMKM Nukita Food</p> | <p>Hasil penelitian, bahwa UMKM Nukita Food hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan kas kecil dan belum menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK ETAP.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 9 | Alabi Y, Awe, O.J & Musa, L.Y (2015) ISSN: 2315-7844 | Managing Small And Medium Scale Enterprises In Nigeria: Challenges And Prospect | Observation and review of relevant document were employed in carrying out the study. It is discovered that though adequate finance is indispensable for the successful operation of small and medium scale enterprises, government should create a more conducive environment for small scale business to thrive by streamlining business tax policies to eliminate extortion from small scale businesses. |
| 10 | Teti Rahmawati & Oktaviani Rita Puspasari (2017) Volume 01 E-ISSN: 2579-9991 | Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan | Hasil penelitian dampak dari implementasi SAK ETAP pada kualitas laporan keuangan serta pengaruhnya pada tingkat permodalan menunjukkan variabel besarnya Jumlah Kredit (CA), berhubungan kuat dengan Kualitas Laporan Keuangan UMKM (KW), sehingga hal tersebut memberikan indikasi kuat bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap besarnya kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM. |